

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- AP. Parlindungan, 1993, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju).
- Anisitus Amanat, 2001, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2016, *Hukum Perikatan; Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Aslan Noor, 2006, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Mandar Maju).
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada).
- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada).
- Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan).
- Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo).
- Dhanang Widijawan, 2018, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis*, (Bandung: CV. Keni Media).
- Florianus, 2008, *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*, (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka).
- G. H. S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga).
- Gunanegara, 2017, *Hukum Pidana Agraria, Logika Hukum Pemberian Hak Atas Tanah dan Ancaman Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa)
- Habib Adjie, 2014, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Hans Kelsen, 2006, Terjemahan Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia).
- Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola Surabaya).
- Irene Eka Sihombing, 2005, *Segi-Segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, (Jakarta: Universitas Trisakti).
- Lilik Mulyadi, 2006, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika).
- , 1990, *Tinjauan Malpraktek di Kalangan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dari Sudut Hukum Pidana*, (Semarang: Undip).

- Munir Fuady, 2000, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Mardani, 2013, *Hukum Perikatan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- M. Natsir Asnawi, 2013, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press).
- M. Arba, 2015. *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, 2008, *Membaca dan Mengerti HIR*, (Semarang: Undip).
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada).
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu).
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita).
- Soegondo Notodisoerdjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada).
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Samsaimun, 2018, *Peraturan Jabatan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Dalam Peralihan Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta).
- Salim HS, 2020, *Peraturan Jabatan dan Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, (Depok: Rajawali Pers).
- Syahmin AK, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada).
- Sudjito, 1987, *Prona; Pemsertipikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis*, (Yogyakarta: PT. Liberty)
- Theo Hujibers, 1990, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius).
- Urip santoso, 2016, *Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*, (Jakarta: Prenadamedia).
- , 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu "Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta"*, (Mataram: PT. Raja Grafindo Persada).
- , 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama).

B. Jurnal

Yovita Christian Assikin, Lastuti Abubakar, Nanda Anisa Lubis, *Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Berkaitan Dengan Dibatalkan Akta Jual Beli Ditinjau Dari Peraturan Perundang - Undangan Yang Berlaku*, ACTA DJURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Volume 3, Nomor 1, Desember 2019

Angga, A.& Arifin, R, *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia*. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2019, hal 79

Setyaningrum, A. & Arifin, R., *Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan*, *MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, Vol. 3 No. 1, 2019, hal 4

Tursilani, Tateki, *Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak*, *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 41, No. 1, 2017, hal 51

Ateng Syafrudin, *Menuju penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab* *Jurnal Pro Justisia edisi IV* (Bandung, Universitas Parahyangan, 2000), hal.22

Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP-IPPAT), *“Pembekalan Calon PPAT Dan Kode Etik PPAT Angkatan I Tahun 2009”*, (Jakarta 24-25 Nopember 2009).

Harsono, *Gambaran Trans Disosiatif Pada Mahasiswi*, *Journal of Social and Industrial Psychology*, (Vol 1 No 2, 2012), hal.333

Andi Dini Tenri Liu, F.X Arsin Lukman, Widodo Suryandono, *Analisis Terhadap Akta Jual Beli Tanah Yang Tidak Dibacakan Dan Penandatanganan Para Pihak Tidak Dihadiri Oleh Saksi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 16 /Pdt.G/2015/PN.Krg)*, *Indonesia Notary Journal Universitas Indonesia*, Vol 1, No 001, 2019, hal, 2

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2
Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(Permen ATR/BPN 2/2018)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

